

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah ilmu atau studi yang mempelajari mengenai perekonomian dalam suatu negara dalam skala besar atau secara agregat. Cakupannya yaitu mengenai bagaimana permintaan agregat dan penawaran agregat dapat mempengaruhi output dalam perekonomian dalam satu periode dalam suatu negara. Ruang lingkupnya mencakup resensi, kemakmuran, output barang dan jasa, laju inflasi, laju pertumbuhan output, pengangguran, tenaga kerja, neraca pembayaran dan nilai kurs.

Kebijakan ekonomi suatu negara tergantung pada tujuan dari dijalankannya kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian suatu negara, seperti masalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan permasalahan makro ekonomi jangka panjang, masalah pengangguran, masalah inflasi, dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Adapun tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah menstabilkan kegiatan ekonomi, menghindari inflasi, menanggulangi masalah tenaga kerja, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan menstabilkan neraca pembayaran.

Kebijakan ekonomi makro sendiri dibagi menjadi tiga sektor yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dipaparkan di atas.

Yang pertama yaitu kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menambahkan pengeluaran agregat maka juga akan meningkatkan pendapatan nasional dan akan mempengaruhi menurunnya pengangguran.

Kebijakan ekonomi makro yang kedua adalah kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk mempengaruhi suku bunga dan penawaran uang yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Apabila angka pengangguran meningkat maka pemerintah bisa menurunkan suku bunga dengan cara mempengaruhi penawaran uang, sehingga penanaman modal bisa meningkat sehingga bisa mendorong kegiatan ekonomi semakin meningkat pula dan pengangguran bisa teratasi.

Kedua kebijakan diatas merupakan kebijakan makro ekonomi dari segi permintaan. Dari segi lain ada juga kebijakan dari segi penawaran yaitu kebijakan pendapatan (*incomes policy*) yang mengatur mengenai tuntutan pendapatan pekerja secara berlebihan melebihi produktivitas pekerja, meningkatkan motivasi pekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga, yang kedua meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan sektor usaha dengan melakukan kebijakan memberikan insentif bisa berupa pengurangan pajak atau pembebasan biaya pajak bagi perusahaan yang melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi penawaran juga bisa dengan melakukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan pemerintah.

Dengan adanya peran pemerintah seperti infrastruktur yang memadai dan pemerintah yang cenderung tertata dalam memberikan kebijakan yang dapat mendorong sektor ekonomi khususnya sektor swasta maka dapat meningkatkan efisiensi produktifitas pengusaha.¹²

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan tempat bertemunya masyarakat yang akan bertransaksi antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana. Yang dimaksud pemilik dana adalah masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang akan disimpan di bank atau ingin diinvestasikan di bank. Menyimpan dana di bank merupakan salah satu alternatif untuk menyimpan dana karena aman dan terpercaya. Selain aman, dana akan diputar oleh pihak bank untuk disalurkan kepada masyarakat penggerak usaha yang membutuhkan dana.¹³

Bank syariah terbentuk dari dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank berarti suatu lembaga yang menghimpun dana atau perantara antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan orang yang butuh dana. Sedangkan kata syariah dalam dunia perbankan adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah atau pihak kedua untuk

¹²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga,*, hal. 22

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 5

melakukan transaksi penyimpanan dana, pembiayaan oleh bank syariah terhadap nasabah maupun transaksi lain yang berhubungan dengan bank sesuai dengan tata hukum islam.

Dalam transaksi perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga bank baik dalam penghimpunan dana, penyuluhan, lalu lintas pembayaran dan peredaran uang baik dari debitur maupun untuk debitur, karena dalam hukum islam bunga merupakan suatu hal yang mendekati riba. Maka dari itu, Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ajaran hukum islam khususnya dalam tata cara bermuamalat yang menjauhi penerapan yang mengandung unsur ketidakjelasan seperti riba dan diganti dengan dasar bagi hasil pembiayaan.

2. Sejarah Bank Syariah

Di Indonesia bank syariah merupakan hal yang relatif baru. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah memeluk agama islam, namun bank syariah baru muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Diskusi mengenai ekonomi berbasis islam sudah ada sejak awal 1980an. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai memprakarsai berdirinya bank syariah. Bank syariah yang pertama muncul adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dan akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Saat ini selain BMI

sudah banyak bank syariah bermunculan seperti lembaga perbankan milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), juga ada beberapa bank konvensional yang membuka cabang bank syariah seperti BNI syariah, Bank IFI, Bank BPD Jabar, BRI syariah dan masih banyak lagi.

Negara yang pertama kali melakukan prinsip perbankan syariah yaitu Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. perbankan syariah mulai muncul di Kairo Mesir pada tahun 1963 bernama Islamic Rural Bank di desa Mith Ghamr. Di negara-negara islam lainnya seperti di Uni Emirat Arab mulai muncul pada tahun 1975 yaitu Dubai Islamic Bank, kemudian berdirilah Kuwait Finance House pada tahun 1977 di Kuwait dan Faisal Islamic Bank pada tahun 1978 di Mesir. Langkah-langkah pendirian bank syariah tersebut kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investmen and Development Bank.

Saat ini bank syariah sudah menyebar keseluruh dunia baik negara-negara muslim maupun negara-negara non muslim seperti di benua Amerika, benua Australia, dan Eropa. Selain itu juga banyak bank di berbagai negara yang membuka cabang bank syariah seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank.¹⁴

¹⁴Ibid, hal 242-245

3. Landasan Hukum Bank Syariah

Undang-undang yang membahas mengenai bank syariah sudah banyak dibuat seperti :

- 1) Undng-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Perubahan;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perbankan syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian peraturannya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank dan Bagi Hasil. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu bentuk usaha adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral membuat pokok-pokok ketentuan yaitu:

- 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Pembentukan dan pembagian tugas Dewan Pengawas Syariah;
- 3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pendirian bank syariah sudah diatur ketenuan-ketentuannya dalam peraturan Bank Indonesia yaitu dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta tentang pelayanan bank syariah. Selain itu juga ada peraturang Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah yaitu tercantum dalam PBI No. 6/24/PBI/2004.¹⁵

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai muslim harus menjalankan kehidupan sehari-sehari sesuai dengan aturan-aturan hukum islam. Begitu juga dalam bermuamalah harus sesuai dengan syariat islam, seperti tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*

¹⁵Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), hal 5

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa bank syariah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ajaran islam dan tidak boleh menyeleweng (batil). Bank syariah harus menerapkan prinsip tolong-menolong demi mencapai kesejahteraan bersama.¹⁶

4. Aset Bank Syariah

Aset atau harta suatu perusahaan merupakan harta yang berperan dalam menjalankan operasi perusahaan seperti kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Secara teoritis, pengertian dari aset menurut beberapa pihak adalah :

- 1) Menurut APB *statement*, bahwa aset adalah kekayaan ekonomi yang dimiliki perusahaan termasuk juga pembebanan yang ditunda, yang dapat dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akuntansi
- 2) Menurut FASB, aset merupakan kemungkinan kekayaan ekonomi yang didapatkan atau diakui dimasa yang akan datang oleh suatu lembaga sebagai akibat dari transaksi atau kejadian yang lalu.

Apabila dilihat dari jenisnya, aset dibedakan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. a) Aset lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dicairkan menjadi uang dalam waktu yang

¹⁶Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

singkat yaitu terhitung satu periode buku atau 12 bulan. Yang termasuk dari aktiva lancar sendiri antara lain kas, bank, surat-surat berharga, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, biaya dibayar di muka, persediaan, pinjaman, dan lain-lain. Apabila dilihat berdasarkan PSAK 1 karakteristik aktiva lancar adalah :

- 1) Entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau menjual aktiva lancar dalam kurun waktu kurang dari satu tahun buku
- 2) Entitas usaha mempunyai aktiva yang ditujukan untuk diperjual-belikan
- 3) Entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentang waktu periode satu tahun buku atau dalam waktu 12 bulan setelah laporan
- 4) Kas atau yang setara dengan kas kecuali yang tidak bisa digunakan untuk membayar kewajiban paling tidak satu tahun buku. Yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi yang dilakukan oleh entitas yang bersifat jangka pendek dan likuid, sehingga mudah untuk dijadikan kas dengan nominal yang bisa ditentukan dan risiko perubahan nilai yang sangat tidak signifikan.

Sedangkan aset tidak lancar atau biasa disebut dengan aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif, dapat juga untuk disewakan kepada pihak lain, yang kemungkinan

digunakan lebih dari satu periode. Aktiva tidak lancar dapat dibedakan berdasarkan sifat dan kegunaannya yang serupa dalam operasi normal entitas, seperti bangunan, mesin, kendaraan, tanah, peralatan kantor, dan lain-lain. Aset tetap memiliki tiga karakteristik yaitu :

- 1) Harus berupa bentuk fisik;
- 2) Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk operasi normal; dan
- 3) Tidak sebagai aset yang diperjual-belikan dalam operasi normal¹⁷

5. Hubungan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada pengelolaan perekonomian makro, dengan adanya peningkatan penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keuangan syariah dengan sektor riil dan menciptakan keharmonisan diantara keduanya. Semakin luas penggunaan produk dan instrumen syariah, mendukung kegiatan keuangan dan juga mengurangi transaksi-transaksi spekulatif. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena sudah memiliki landasan hukum yang memadai (OJK, 2017).

¹⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 67-68

Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Murni (2006) pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standart hidup masyarakat. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan GDP riil yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu.¹⁸

C. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

1. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah yang memiliki jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah.¹⁹ Dengan adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai kebijakan moneter merupakan salah satu pengatur moneter yang memiliki keberhasilan yang cukup signifikan. Akan tetapi dengan adanya sistem

¹⁸ Salahuddin Al-Ayyubi, Lukytawati Anggreini, dan Almira Dyah Mahiswari, “Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Al-Muzara’ah, Vol. 5, No. 2, 2017, Hal. 89

¹⁹Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

diskonto pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), maka bank syariah tidak dapat ikut dalam upaya pengendalian jumlah uang beredar. Maka dari itu Bank Indonesia menyiapkan adanya Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, namun ternyata dengan karakter dasarnya yaitu prinsip wadiah rupanya kurang berjalan efektif. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas pengendalian moneter, maka Bank Indonesia membentuk instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sistem diskonto pada SBI digantikan dengan beberapa akad yang sesuai dengan prinsip islam. Akad yang dapat diterapkan dalam SBIS adalah akad *Mudharabah, Musyarakah, Ju'alah, Wadi'ah, Qardh, dan Wakalah*. Dari beberapa akad yang telah disebutkan diatas, saat ini SBIS menggunakan sistem akad *Ju'alah*. *Ju'alah* adalah komitmen atau janji atau disebut *iltizam* untuk memberikan imbalan atau *'iwadh* atau *ju'l* tertentu atas pencapaian hasil atau disebut *natijah* yang telah ditentukan sari suatu pekerjaan.²⁰

Ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* atau diperbolehkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan ini dapat ditoleransi karena

²⁰Bab III Akad dan Karakteristik SBIS Pasal 3, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah

akad dalam lapangan *ju'alah* tidak sama dengan akad ijarah yang murni berupa pemberian upah yang dibayarkan tanpa ada unsur untung. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan akad *ju'alah* antara lain : a) ada unsur *ja'il* (pelaksana yang memberikan tugas) untuk melakukan *ju'alah*; b) pihak yang melakukan *ju'alah* adalah yang menjadi peserta; c) objek *ju'alah* adalah perbuatan yang mubah; d) upah bagi pihak yang menang harus berbentuk materi atau jasa; e) akad dalam *ju'alah* tidak disyaratkan harus dengan lafadz tertentu.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki beberapa karakteristik, yaitu : a) Menggunakan akad *ju'alah* dan berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBIS dapat juga menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *qardh*, dan *wakalah*. b) Bersatuan unit sebesar Rp 1.000.000. c) Berjangka waktu minimal satu bulan dan maksimal 12 bulan. d) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). e) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia. f) Tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder. Sama dengan SBI, SBIS merupakan instrumen moneter yang diperjual belikan di operasi pasar terbuka, melalui mekanisme perbankan syariah. Mekanisme penerbitan SBIS adalah melalui cara lelang. Yang dapat mengikuti pelelangan SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS yang wajib memenuhi persyaratan

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.²¹

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai fungsi untuk membantu bank syariah di Indonesia yang mempunyai kelebihan likuiditas, dapat menyimpan dana yang menganggur di tempat yang aman dan tentunya menguntungkan. Untuk mendukung adanya SBIS, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertidikat wadi'ah bank Indonesia, dimana pada sebelum tahun 2008 SBIS dikenal dengan sebutan SWBI (Sertidikan Wadi'ah Bank Indonesia) yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia selaku Bank Sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI;
- b. Akad yang digunakan untuk SWBI adalah akad wadi'ah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan;
- c. SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemebrian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia;

²¹Pasal 8, *Penjelasan Bank Indonesia* Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

d. SWBI boleh diperjual belikan.²²

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas titipan dana yang diperhitungkan jika pada saat jatuh tempo. Dana yang dapat dititipkan ke Bank Indonesia minimal Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00. Terkait sertifikat Wadi'ah Indonesia diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 2/9/2000 tanggal 23 Februari 2000, PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas PBI No. 29/9/2000 tentang sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret tahun 2008 BI mengeluarkan peraturan No.10/11/PBI/2008 tentang perubahan nama SWBI menjadi SBIS dengan adanya perubahan nama tersebut akad yang digunakan dalam transaksi SWBI menjadi lebih luas tidak hanya berakad wadi'ah saja namun, dapat menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wakalah, qardh, dan ju'alah sehingga bonus yang diberikan SBIS dapat mendekati bonus yang diberikan oleh SBI. SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang diatur oleh BI dan fatwa DSN.²³

²² Khusul Khatimah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah tahun 2007-2008", (Jurnal Optimal, Vol. 3, No. 1, Maret, Bekasi, 2009), hal. 12

²³ <http://bi.go.id/web/id/Peraturan/Moneter/pbi>

Bank Indonesia dalam operasinya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjajikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah dengan cara bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan pada saat jatuh waktu SBIS.

Ketentuan hukum SBIS adalah sebagai berikut :

- a. SBIS sebagai instrument pengendali moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT);
- b. BI memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang digunakan;
- c. BI wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo; dan
- d. BI boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

2. Mekanisme Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Mekanisme penerbitan SBIS adalah melalui lelang yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008.

Prosedur pelaksanaan transaksi SBIS dengan sistem pelelangan sebagai berikut :

- a. BI memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang, imbalan, jangka waktu, dan sebagainya kepada BUS, UUS, atau pialang atas nama BUS dan UUS;
- b. BUS, UUS, dan pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian SBIS ke BI;
- c. Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang;
- d. BI melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS dan mendebet saldo rekening giro pada BUS, UUS, atau pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut; dan
- e. Setelah jatuh tempo BI membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal + imbalan dalam rangka setelmen dana.

Perhitungan imbalan SBIS berdasarkan rumus : Nilai imbalan SBIS = Nilai nominal SBIS \times (jangka waktu SBIS/360) \times tingkat imbalan SBIS.

Contoh perhitungan sebagai berikut :

Tanggal lelang	: 5 maret 2008
Jangka waktu SBIS	: 1 bulan (28 hari)
Tanggal setelmen	: 5 Maret 2008
Tanggal jatuh waktu	: 2 April 2008
Tingkat diskonto SBI 1 bulan	: 8%

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS “A” sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka besar imbalan yang

diterima pada saat SBIS jatuh waktu sebesar Rp 6.222.222,22 dengan rincian sebagai berikut : $\text{Rp } 1000.000.000,00 \times (28/360) \times 8\% = \text{Rp } 6.222.222,00$. Jadi jumlah yang diterima BUS “A” ada saat jatuh waktu adalah nilai nominal + imbalan SBIS, sebesar Rp 1.006.222.222,00.

3. Hubungan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

SBIS merupakan instrumen moneter yang disediakan oleh otoritas moneter dalam hal ini BI sebagai alternatif penyimpanan kelebihan dana yang tidak di salurkan kepada sektor riil serta dapat membantu likuiditas perbankan syariah. Namun dengan menempatkan dana di SBIS mengakibatkan uang yang tidak berputar (*idle fund*) yang tidak sesuai dengan pemikiran Imam Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu seperti air, serta pemekiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa uang itu seperti darah, harus selalu mengalir karena jika tidak maka akan terjadi masalah pada fungsi organ tubuh. Dapat disimpulkan bahwa, apabila terdapat uang yang tidak berputar maka perekonomian tidak dapat berjalan dengan optimal karena uang tidak disalurkan seluruhnya kepada sektor riil.

Dengan demikian apabila bank lebih memilih menempatkan dannya pada instrumen SBIS maka akan mengurangi porsi pembiayaan yang disalurkan kepada sektor riil sehingga akan

mengurangi penciptaan barang dan jasa di masyarakat, menurunkan tingkat pendapatan masyarakat yang akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.²⁴

D. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang selaras namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang membedakan antara keduanya adalah apabila pertumbuhan ekonomi tidak melihat faktor pertumbuhan penduduk, kemudahan dalam pemerataan pendapatan, dan perubahan struktur perekonomian. Sedangkan pembangunan ekonomi yang dinilai merupakan proses dari perubahan yang dilihat dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Proses tersebut antara lain menaikkan pendapatan perkapita secara terus menerus atau berjangka panjang, perubahan sistem baik dalam hal perekonomian, hukum, politik, sosial, budaya maupun hukum.

Pertumbuhan ekonomi secara istilah adalah bertambah banyaknya jumlah produksi industri, berkembangnya sarana dan prasarana, bertambahnya jumlah sarana pendidikan, bertambahnya sektor produksi baik barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan

²⁴ Wulan Ansuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2, 2013, hal 279

salah satu penyelidikan yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Menurut Muana Nanga dalam penelitian heidy pertumbuhan ekonomi adalah suatu aktifitas yang dilakukan untuk mendorong suatu keahlian dari kegiatan perekonomian yang dihitung secara kuantitatif hasil dari keluaran barang atau jasanya yang digambaran melalui PDB (pendapatan output perkapita).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pertumbuhan ekonomi mengacu kepada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.²⁵

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.²⁶

Meier dan Baldwin mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Defisi ini menekankan pada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Proses;
- b. Output perkapita; dan
- c. Jangka panjang.

²⁵ Didin, S. Damanhuri, *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, (Bogor : IPB Press, 2010), Hal. 2

²⁶ Basuki Pujualwatan, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoristis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 87

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam penelitian heidy berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki modal dan SDM melalui investasi yang dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil akhir yang optimal melalui inovasi yang kreatif. Apabila ingin melihat seberapa berhasil pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu maka bisa dilihat kuantitas dari PDRB pada suatu daerah. Lincoln Arsyad dalam penelitian heidy mengemukakan bahwa untuk melihat kuantitas dari PDRB dalam hal ini untuk mengukur seberapa tingkat pertumbuhan ekonomi maka tidak perlu melihat faktor pertumbuhan penduduk.²⁷

Pertumbuhan ekonomi dalam terma ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB).²⁸

²⁷Heidy Menajang *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Hal. 419

³³*Ibid* . Hal. 433-437.

²⁸ Naf'an, *Ekonomi Makro : Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), Hal. 235

Biasanya badi negara yang sedang berkembang, nilai GDP lebih besar dari GNP. Hal ini disebabkan investor asing lebih banyak menanamkan modalnya dinegara yang sedang berkembang. Atas dasar itu, bagi negara-negara yang sedang berkembang lebih cenderung menggunakan GDP dari pada GNP.²⁹

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila *output* ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara bertambah besar dari waktu-waktu sebelumnya.³⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Banyak tokoh yang mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi seperti teori ekonomi klasik. Berdasarkan pemikiran tokoh ekonomi klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah penduduk, jumlah modal yang dimiliki, jumlah aset yang dimiliki, teknologi yang digunakan, serta kekayaan alam yang dipotensikan. Berbeda dengan teori lainnya, ahli ekonomi klasik sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Apabila penambahan

²⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Depok : Kencana : 2017), Hal. 38

³⁰ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoristis, dan Empiris*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), Hal. 89

jumlah penduduk hampir tidak ada dan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan produksi digunakan secara optimal maka keuntungan yang didapatkan akan semakin meningkat, baik dalam hal output produksi maupun investasi. Begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan penduduk relatif meningkat menurut ahli ekonomi klasik produktifitas akan mengalami penurunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan akan semakin menurun, hal tersebut dapat mendorong turunnya pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan teori ekonomi klasik, menurut ahli ekonomi neo-klasik pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari sisi penawaran. Faktor yang memberikan sumbangsih terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah faktor produksi seperti skill para pekerja, dan seberapa canggih alat yang digunakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, antara lain :

e. Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan dan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat dapat diartikan sebagai daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkatan harga. Sedangkan penawaran agregat merupakan hubungan antara

keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

f. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi dan tabungan merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

g. Investasi

Menurut Samuelson, pendapatan nasional bisa fluktuatif karena perubahan investasi yang diakibatkan karena perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya.³¹

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Suatu negara memiliki acuan dalam menentukan tingkat kuantitas dari pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator pertumbuhan ekonomi antara lain :

a. Pendapatan per Kapita

Pendapatan Per Kapita merupakan hasil yang diperoleh suatu penduduk dari kegiatan ekonomi dalam periode tertentu.

b. Tenaga kerja dan Pengangguran

³¹ *Ibid.*, Hal. 85

Tenaga kerja merupakan penggerak suatu produktifitas yang mampu melakukan usaha atau melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan menghasilkan output barang atau jasa guna mendapatkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain. Sedangkan yang dimaksud pengangguran adalah seseorang yang mampu melakukan usaha namun tidak melakukan usaha atau tidak dapat menghasilkan produktifitas. Dari dua hal ini diketahui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang melebihi tingkat penganggurannya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Apabila membicarakan kesejahteraan masyarakat maka terbesit suatu hal yang tidak bisa dinilai dari tingkat kuantitatif. Karena hakikatnya kesejahteraan setiap individu tidak bisa disama ratakan. Namun menurut ahli ekonomi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari seberapa rendah tingkat kemiskinan, dan seberapa tingginya kegiatan konsumsi yang dilakukan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian M. Putra Rizki, dan Fakhruddin yang berjudul Intermediasi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang bertujuan menginvestigasi peran intermediasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode penelitian 2000-2012

yang menggunakan metode analisis data bersifat kuantitatif dengan model VECM (*Vector Error Correccion Model*) dalam empat variabel yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pembiayaan bank syariah (Fi), pertumbuhan sektor riil (Td) dan pertumbuhan ekonomi (GGDP). Hasil pengujian menyebutkan bahwa SBIS mempengaruhi total pembiayaan bank syariah dan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan pembiayaan bank syariah berpengaruh pada semua variabel yaitu SBIS, pertumbuhan sektor riil, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulan Asnuri yang berjudul Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan dalam perbankan syariah (PEM), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model kesalahan koreksi (ECM). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS jangka pendek memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya bahwa total pembiayaan dan kontribusi ekspor tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. dalam jangka panjang variabel SBIS, total pembiayaan bank syariah dan kontribusi ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.³²

³² Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", AL-Iqtishad, Vol. V No. 2, 2013, Hal. 275

Penelitian yang berjudul Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang dilakukan oleh Rika Yulita Amalia, Syifa Fauziah, dan Indah Wahyuningsih bertujuan untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel zakat, pembiayaan bank syariah, dan PDB terhadap IPM. Metode yang digunakan peneliti adalah *path analysis* untuk mengkaji hipotesis hubungan sebab akibat. Dalam penelitian tersebut menghasilkan hubungan langsung antara PDB dan pembiayaan bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel zakat dan pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap PDB. Nilai koefisien paling besar antara hubungan langsung adalah variabel pembiayaan bank syariah terhadap PDB yaitu sebesar 81,7%. Untuk hubungan langsung antara variabel zakat dan IPM tidak diketahui, sedangkan hubungan secara tidak langsung menunjukkan adanya pengaruh melalui PDB dan terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan bank syariah dengan IPM melalui PDB.³³

Penelitian ini berjudul Pengaruh Perbankan atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Haqiqi Rafsanjani dan Raditya Sukmana. Penelitian ini mengkaji pengaruh perbankan (konvensional dan syariah) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara Kointegrasi dan Kausalitas

³³ Rika Yulita Amalia, Syifa Fauziah, dan Indah Wahyuningsih, "Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Indonesia", AL-Muzara'ah, Vol. 7 No. 1, 2019, Hal. 33

Granger yang menunjukkan bahwa secara umum perbankan konvensional dan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik H.R yang berjudul Pengaruh Perkembangan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu yang mengandung variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu aset bank umum, aset bank syariah, dan total pembiayaan bank umum serta bank syariah berpengaruh secara simultan terhadap produk domestik bruto sektor perbankan di Indonesia tahun 2010-2015. Sedangkan variabel total aset bank umum syariah berpengaruh secara parsial terhadap produk domestik bruto sektor perbankan di Indonesia. Sedangkan pada variabel bebas yaitu total pembiayaan bank umum syariah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto sektor perbankan di Indonesia periode 2010-2015.³⁵

Penelitian ini berjudul Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2014 yang dilakukan oleh Ina Sholati Cahyaningrum. Penelitian ini bertujuan untuk

³⁴ Haqiqi Rafsanjani dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Perbankan atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Vol. 12 No. 3. 2014, Hal 492

³⁵ Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik H.R., "Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Penerapan, Vol. 4 No. 12, 2017, Hal 952-966

menguji signifikansi sektor riil industri pengolahan, sektor riil PHR, keuangan syariah pada bank syariah dan keuangan syariah pada BPRS terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode analisis uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian tersebut menghasilkan secara parsial variabel keuangan bank syariah dan keuangan BPRS berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun variabel sektor riil industri pengolahan dan sektor riil PHR secara statistik tidak dapat dilanjutkan karena terdapat permasalahan multikolinearitas.³⁶

Penelitian yang berjudul Peran Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Di Indonesia (Pendekatan Model VAR/VECM) yang dilakukan oleh Iwan Setiawan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara variabel independen dan dependen serta mengetahui respond dan besar kontribusi pembiayaan perbankan syariah dan tingkat bonus SWBI/SBI Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2003-2015 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan korelasi antar variabel digunakan pendekatan Granger Causality dan VAR / VECM. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dua arah antara pembiayaan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan volume

³⁶ Ina Sholati Cahyaningrum, “Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007-2014”, An-nisbah, Vol. 04 No. 01, 2017, hal 106

pembiayaan dimasa lalu memiliki pengaruh terhadap perubahan output riil dimasa sekarang dan sebaliknya. Untuk variabel SWBI masa lalu akan mempengaruhi nilai pembiayaan sektor perbankan syariah dan tingkat inflasi dimasa sekarang. Dalam jangka panjang pertumbuhan pembiayaan perbankan syariaah dan bonus SWBI/SBI Syariaah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun untuk kontribusi pembiayaan syariaah dan bonus SWBI/SBI Syariaah terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur Wibowo dan Ahmad Mubarak berjudul Analisis Eektivitas Transmisi Moneter Ganda terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa efektivitas mekanisme transmisi melalui dua jalur sehingga disebut jalur ganda yaitu jalur syariaah berupa pembiayaan dan bagi hasil dan jalur konvensional berupa kredit dan suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan data periode 2008-2015. Pengujian data menggunakan uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji stabilitas, uji kausalitas, analisis *Impluse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel jalur syariaah yaitu pembiayaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk variabel bagi hasil dan SBIS tidak

³⁷ Iwan Setiawan, "Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perekonomian di Indonesia (Pendekatan Model VAR/VECM)", TEDC, Vol. 11 No. 2, 2017, Hal. 172

efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan variabel jalur konvensional yang terdiri dari total kredit dan SBI tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel suku bunga kredit efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁸

Penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Transmisi Moneter ganda melalui jalur kredit dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2018 yang dilakukan oleh Muhammad Imaduddin bertujuan untuk melakukan analisa terkait pembiayaan syariah dan kredit konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti menggunakan metode *Vector Autoregressive dan Vector Error Correction Model* (VECM) dengan menggunakan data periode 2011-2018. Dalam penelitian ini menggunakan uji stasioner, uji kointegrasi, uji stabilitas, uji kausalitas, analisis *Impluse Response Function* (IRF), dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Dari pengujian VECM *estimation* variabel yang mendapat respon positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah variabel pembiayaan syariah. Berdasarkan IRF variabel Financing membutuhkan 5 periode untuk berada pada keadaan stabil. Sedangkan berdasarkan uji FEVD variabel financing mempunyai kontribusi terhadap pembentukan IPI rata-rata sebesar 16% hingga akhir periode.³⁹

³⁸ Muhammad Ghafur Wibowo dan Ahmad Mubarak, “Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 25 No. 2, 2017, Hal. 126

³⁹ Muhammad Imaduddin, “Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Melalui Jalur Kredit dan Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2011-2018”, Journal of islamic economics and philanhropy. Vol. 01 No. 03, 2019, Hal 413

Penelitian berjudul Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang dilakukan oleh Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati Anggreini dan Almira Dyah Mahiswari bertujuan menganalisa hubungan kausalitas antara perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis respon pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat terjadi guncangan pada variabel perbankan syariah dan juga untuk mengetahui kontribusi variabel perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk melihat pengaruh jangka panjang dan respon terhadap guncangan yang terjadi pada variabel yang diteliti, menggunakan data dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2016. Hasil penelitian ini adalah adanya *bidirectional causality* antara pembiayaan syariah dan GDP. Dari hasil pengujian VECM menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil uji IRF menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan dana pihak ke tiga (DPK). Untuk hasil uji FEVD menunjukkan hasil bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak ada DPK.⁴⁰

⁴⁰ Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati Anggraeni, dan Almira Dyah Mahiswari, “Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, AL-Muzara’ah, Vol. 5 No. 2, 2017, Hal. 88

Penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Ahmad Fadlan Lubis bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan yang disalurkan dan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan jumlah pembiayaan yang diberikan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia dan apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan teknik pengumpulan data sekunder selama periode 2003-2013. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik menggunakan program *eviews* 0.6 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia.⁴¹

F. Kerangka Konseptual

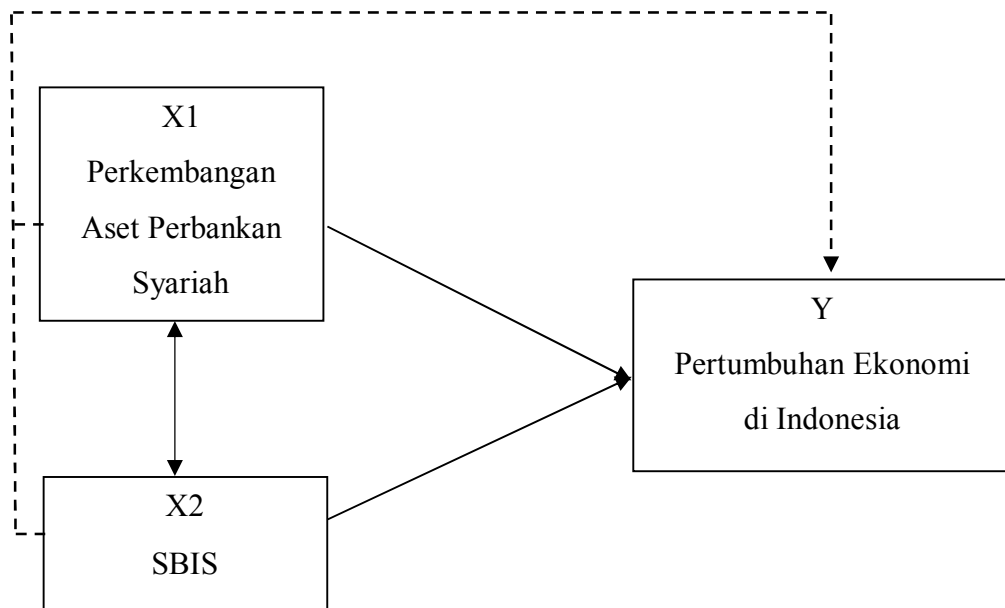
Kerangka konseptual atau biasa disebut dengan kerangka berpikir adalah gambaran dari penelitian yang ingin dilakukan yang merupakan

⁴¹ Ahmad Fadlan Lubis, "*Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah di Indonesia*", Nusantara, Vol. I. 2016, Hal. 102

sistematika berpikir dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencari solusi dari masalah yang diciptakan.⁴²

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: Data yang diolah

G. Hipotesis

Apabila dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan rumusan masalah, maka disini penulis akan menjabarkan dugaan sementara dari hubungan variabel-variabel yang bersangkutan dengan penelitian. Hipotesis sementara dari penelitian ini adalah :

⁴²Abdul Hamid, *“Teori Belajar dan Pembelajaran”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.27

1. H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Perkembangan Aset Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara parsial
 H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Perkembangan Aset Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara parsial
2. H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel SBIS Pertum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara parsial
 H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel SBIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara parsial
3. H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Perkembangan Aset Perbankan Syariah dan SBIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara simultan
 H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Perkembangan Aset Perbankan Syariah dan SBIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara simultan.